



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 2 Juni 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA2023, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 46 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI yang agendanya adalah: **“Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 dan 2022 serta Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Agama RI, sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2021 mencapai 99,51 % atau sebesar Rp68.591.964.324.339 (*enam puluh delapan triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dari pagu sebesar Rp68.931.482.470.000 (*enam puluh delapan triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - b. Tahun anggaran 2022 hingga tanggal 31 Mei 2022 mencapai 36,04 % atau sebesar Rp24.062.126.708.073 (*dua puluh empat triliun enam puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah*) dari pagu sebesar Rp66.772.394.400.000 (*enam puluh enam triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan empat juta empat ratus ribu rupiah*).

Capaian realisasi anggaran tahun 2021 dan tahun 2022 hendaknya dijadikan acuan dalam pengelolaan anggaran dan program tahun 2023
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Agama RI tahun 2023 yang sebesar Rp69.010.639.547.000,- (*enam puluh sembilan triliun sepuluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dengan rincian, berdasarkan unit eselon I, sebagai berikut:

No.	Program	Pagu Indikatif	
		Nilai (dalam ribuan rupiah)	%
1	Sekretariat Jenderal	2.462.916.941	3,57
2	Inspektorat Jenderal	167.213.825	0,24
3	Ditjen Bimas Islam	5.676.601.852	8,23

No.	Program	Pagu Indikatif	
		Nilai (dalam ribuan rupiah)	%
4	Ditjen Pendidikan Islam	54.482.522.600	78,95
5	Ditjen Bimas Kristen	1.903.823.959	2,76
6	Ditjen Bimas Katolik	899.182.525	1,30
7	Ditjen Bimas Hindu	799.275.748	1,16
8	Ditjen Bimas Buddha	274.716.836	0,40
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji & Umrah	1.527.072.456	2,21
10	Badan Litbang dan Diklat	628.634.057	0,91
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	188.678.748	0,27
JUMLAH		69.010.639.547	100

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut pagu indikatif Kementerian Agama RI tersebut dengan pejabat eselon I.

- Komisi VIII DPR RI memahami usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI tahun 2023 sebesar Rp12.207.723.568.000 (*dua belas triliun dua ratus tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), dengan rincian, berdasarkan unit eselon I, sebagai berikut:

No.	Program	Nilai (dalam ribuan rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	227.125.131
2	Inspektorat Jenderal	66.261.191
3	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	2.495.138.565
4	Ditjen Pendidikan Islam	8.032.934.718
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	224.764.410
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	19.750.000

No.	Program	Nilai (dalam ribuan rupiah)
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	143.607.000
8	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	50.000.000
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji & Umrah	47.916.277
10	Badan Litbang dan Diklat	143.674.851
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	756.551.425
JUMLAH		12.207.723.568

4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI agar dalam meningkatkan pengelolaan anggaran tahun 2022 dan menyempurnakan penyusunan program dan anggaran tahun 2023 menindaklanjuti saran dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain sebagai berikut:
- a. Mengupayakan keadilan anggaran antara fungsi pendidikan dan fungsi agama di Kementerian Agama RI dan adanya kesetaraan alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kementerian Agama RI dan Kemendikbud-Ristek RI.
 - b. Meningkatkan kemitraan dan sinergitas pelaksanaan program Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI seperti bantuan lembaga pendidikan keagamaan, moderasi beragama, dan bantuan rumah ibadah atau program lainnya.
 - c. Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan program, seperti persoalan BOS dan BOP Pesantren.
 - d. Mengevaluasi perencanaan pemanfaatan anggaran yang bersumber dari SBSN, mengingat pengalokasian anggaran SBSN belum terencana dengan baik dan integratif.
 - e. Mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kementerian Agama RI.

5. Meminta Kementerian Agama RI untuk melakukan verifikasi dan validasi data terhadap lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Agama RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H. YANDRI SUSANTO, Spt.